

Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dengan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda

Zahra Dewi Yuningtias¹, Delfia Uli Damayanti Siagian^{2*}, Merina Tinta Fattrisia³, Naili Sofia⁴, Devia Amalia⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Alamat: Jl. Margonda No.8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

*Korespondensi penulis: siagiandelfia32@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Samarinda City Government from 2020 to 2022, including revenue variance, revenue growth, revenue effectiveness, and expenditure performance based on expenditure variance, expenditure growth, operational expenditure, capital expenditure, and expenditure efficiency. The financial ratios used include revenue variance, revenue growth rate, independence ratio, diversification degree, PAD effectiveness, expenditure variance, expenditure growth rate, operational cost ratio to total costs, capital expenditure ratio to total expenditure, and expenditure efficiency. The data used in this research is secondary data collected through documented library studies. The findings indicate that (1) the financial performance of Samarinda City's original revenue is generally quite good, with an average variance of 2.49% and a growth rate of 77.99%, while (2) expenditure growth shows a negative trend with an average of -0.027%.*

Keywords: *Performance, Realization, Budget, Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2020-2022, mencakup varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, efektivitas pendapatan, serta analisis kinerja belanja daerah berdasarkan varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasional, belanja modal, dan efisiensi belanja. Rasio keuangan yang digunakan meliputi varians pendapatan, tingkat pertumbuhan pendapatan, rasio independensi, derajat diversifikasi, efektivitas PAD, varians belanja, tingkat pertumbuhan belanja, rasio biaya operasional terhadap total biaya, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan efisiensi belanja. Data penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kinerja pendapatan asli daerah Kota Samarinda secara umum cukup baik dengan rata-rata varians 2,49% dan tingkat pertumbuhan 77,99%, namun (2) pertumbuhan belanja menunjukkan tren negatif dengan rata-rata -0,027%.

Kata kunci: Kinerja, Realisasi, Anggaran, Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menepatkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Penerapan fungsi perencanaan dan pengendalian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi atau penilaian terhadap apa yang telah dicapai. Kami percaya bahwa perusahaan setidaknya harus memeriksa apakah perusahaan telah bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah .(Hendri 2015)

Berikut ini disajikan mengenai Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Pemeerintah Kota Samarinda sejak tahun 2020 sampai 2022 :

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda

tahun	angggran pendapatan	anggaran belanja
2020	Rp 3.013,49	Rp 3.126,49
2021	Rp 2.251,83	Rp 2.591,83
2022	Rp 2.456,52	Rp 2.733,67
jumlah	Rp 7.721,84	Rp 8.451,99
rata rata	Rp 2.573,95	Rp 2.817,33

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2020 adalah anggaran yang paling tinggi. Anggaran pendapatan Kota Samarinda sempat mengalami penurunan di tahun 2021, hingga pada akhirnya mengalami peningkatan Kembali di tahun 2022. Begitu juga sebaliknya, Anggaran belanja Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2020 merupakan yang paing tinggi. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya pada Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Tahun	Realisasi pendapatan	Realisasi belanja
2020	Rp 2.872,84	Rp 2.978,19
2021	Rp 2.860,33	Rp 3.069,98
2022	Rp 2.456,52	Rp 2.987,85
Jumlah	Rp 8.189,69	Rp 9.036,02
Rata rata	Rp 2.729,90	Rp 3.012,01

Sumber data : <https://www.shorturl.asia/id/QbyBZ>

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2020 sampai 2022 selalu mengalami penurunan. Sedangkan realisasi belanja pendapatan Pemerintah daerah Kota Samarinda sempat meningkat di tahun 2021 dan Kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi Pendapatan dan Belanja daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

- 1) Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2020-2022 dilihat dari varians pendapatan sudah baik?
- 2) Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan daerah Pemerintah Kota Samarinda Periode 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan pendapatan positif?
- 3) Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2020-2022 dilihat dari varians belanja selisih menguntungkan?
- 4) Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2020-2022 dilihat pertumbuhan belanja sudah positif?

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik adalah entitas dengan karakteristik yang khas, memiliki sumber daya ekonomi yang cukup besar, bahkan dapat dianggap sangat signifikan. Meskipun organisasi sektor publik melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, hal ini berbeda dengan entitas ekonomi lainnya, terutama perusahaan komersial yang berorientasi pada laba. Sumber daya ekonomi di sektor publik dikelola untuk tujuan non-profit atau nirlaba, bukan untuk menghasilkan keuntungan. (Ummah 2019)

Konsep Akuntabilitas

Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015).

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)

adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Sumber sumber keungan daerah

Istilah keuangan dalam konteks ini merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan uang, termasuk sumber pendapatan, jumlah dana yang memadai, serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Keuangan menjadi faktor penting dalam setiap aktivitas pemerintahan, karena hampir semua kegiatan memerlukan dana. Semakin besar dana yang tersedia, semakin banyak pula aktivitas atau program yang dapat dilaksanakan. Selain itu, semakin baik pengelolaan keuangan tersebut, semakin efektif dan efisien penggunaan dana tersebut. (Rajali 2012)

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah atau pengelolaan rumah tangga daerah. Kedudukan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kemungkinan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Mengenai pentingnya posisi keuangan daerah, Pamudji (1980, 42) menyatakan bahwa "pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa adanya anggaran yang memadai untuk menyediakan pelayanan dan pembangunan." Keuangan daerah ini menjadi salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mengelola urusannya secara mandiri.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Syamsi (1983, 5), yang menyebutkan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa untuk mengelola urusannya, daerah memerlukan dana yang cukup. Tanpa adanya biaya yang memadai, daerah tidak hanya akan kesulitan menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga akan bergantung pada pemerintah pusat, sehingga kemandirian daerah perlu dievaluasi kembali.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Penatausahaan yang efektif sangat penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penatausahaan yang efektif sungguh-sungguhlah penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Analisis rasio keuangan daerah merupakan alat ukur kinerja yang menjadi dasar dalam mengelola organisasi pemerintah dan menjamin pertanggung jawaban publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah menggunakan evaluasi kinerja anggaran untuk mengevaluasi akuntabilitas dan kemampuan keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Miswati Gultom et al. 2020).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government. 5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Rincian Data Yang Diperlukan

Informasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah informasi sekunder. Informasi sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Informasi tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020 sampai dengan 2022 serta data-data lain yang terkait

Jangkauan Penelitian

Studi ini melihat data keuangan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga 2022. Anggaran dan realisasi pendapatan adalah data yang ingin diteliti yaitu anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja di wilayah Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan

Data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang di gunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research) berupa dokumentasi.

Alat Analisis Pengujian Hipotesis

Alat analisis sebagai berikut :

- a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut oleh (mahmudi, 2010:137)

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

- b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Ini Dirumuskan Sebagai Berikut (Mahmudi, 2010:139)

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

- c. Analisis Varian Belanja

Analisis Varian Belanja Dirumuskan Sebagai Berikut (Mahmudi, 2010:157)

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasin} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

- d. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis Ini Dirumuskan Sebagai Berikut (Mahmudi, 2010:160)

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (T-1)} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Varians Pendapatan

Hasil perhitungan varians pendapatan di rekapitulasi dan diukur sesuai kriteria tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Perhitungan Varians Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2020-2022**

(Ribuan)

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varian Pendapatan	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4= 2-3	5
2020	Rp 2.872,84	Rp 3.013,49	Rp - 140,65	Kurang Baik
2021	Rp 2.860,33	Rp 2.251,83	Rp 608,50	Baik
2022	Rp 2.456,52	Rp 2.456,52	Rp -	Kurang Baik

Sumber: Data diolah, 2024

Menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat dikatakan kurang baik. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat varians pendapatan yang ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih hanya pada tahun 2021 dan di tahun 2020, 2022 yang mengalami selisih kurang. Jika dilihat dari tiga periode yang diteliti, maka varians pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu Rp 608,50 sedangkan varians pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2022 yaitu Rp -, tidak ada selisih lebih maupun kurang. Hasil Penelitian ini tidak mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan akan direkapitulasi serta diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2022
(Ribuan)

Tahun	Keterangan		
	Realisasi Pendapatan Tahun (PAD)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4
2019	Rp 462,39	-	-
2020	Rp 2.872,84	83,90%	Positif
2021	Rp 2.860,33	-0,44%	Negatif
2022	Rp 2.456,52	-16,44%	Negatif

Sumber: Data diolah, 2024

Rasio pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu 83,90%. Pada 2021 rasio pertumbuhan menjadi -0,44%, sama halnya dengan rasio pertumbuhan pada tahun 2022 -16,44%, rasio pertumbuhan pada tahun 2020 sudah membaik dikarenakan presentase positif. Di tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang sangat besar, rasio pertumbuhannya sangat buruk karena presentase negatif. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan PAD di tahun 2020 sangat baik terkecuali ditahun 2021 dan 2022 yang sangat buruk.

Analisis Varians Belanja

Hasil perhitungan varians belanja akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Varians (Selisih) Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2022
(Ribuan)

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Varian Belanja	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4 = (2-3)	5
2020	Rp 2.978,19	Rp 3.126,49	-Rp 148,30	Menguntungkan
2021	Rp 3.069,98	Rp 2.591,83	Rp 478,15	Kurang Menguntungkan
2022	Rp 2.987,85	Rp 2.733,67	Rp 254,18	Kurang Menguntungkan

Sumber: Data diolah, 2024

Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Belanja Kota Samarinda dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja di tahun 2021-

2022. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu Rp. 3.069,98, Hasil ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil perhitungan pertumbuhan belanja akan direkapitulasi dengan menggunakan tabel berikut:

**Tabel 4. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2020-2022**

(Ribuan)

tahun	Keterangan		
	Realisasi belanja tahun	Rasio pertumbuhan belanja	kriteria kemampuan
1	2	3	4
2019	Rp 3.067,18	-	-
2020	Rp 2.978,19	-2,99%	negatif
2021	Rp 3.069,98	2,99%	positif
2022	Rp 2.987,85	-2,75%	negatif

Sumber : Data diolah, 2024

Secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Kota Samarinda mengalami pertumbuhan cenderung negatif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020 dan 2022 dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif yaitu -2,99% dan -2,75%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan belanja belum membaik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2020-2022, secara umum dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kota Samarinda sebesar 2,49%, maka hipotesis ditolak.
- 2) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Perhitungan pertumbuhan pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2020-2022, secara umum dikatakan cukup baik dengan rata-rata sebesar 77,99%, maka hipotesis diterima.

- 3) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan belanja pemerintah Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2020-2022, secara umum mengalami fluktuasi (naik turun) Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif yaitu -0.027%, maka hipotesis ditolak

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi, disarankan ke pada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk memperdalam kinerjakeuangan pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio untuk meningkatkan hasil penelitian. Memang benar dan akurat dari penelitian penulis ini.
- 2) Dilakukan pada salah satu kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur bernama Kota Samarinda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dibandingkan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa' Nur Fitriani, & Hayati, N. (2024). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4196–4213. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2619>
- Hendri, E. (2015). Dosen tetap Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang. *Media Wahana Ekonomika*, 12(2), 1–19.
- Lako, A. (2004). *Co Fr Fr*. 8(1), 163–173.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 35(1), 6.
- Prasetyo, R. A. (2017). Pengaruh manajemen keuangan daerah terhadap kinerja anggaran daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 16(1), 45–58.
- Rajali, R. (2012). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Studi tentang strategi peningkatan penerimaan sektor pajak di Kabupaten Aceh Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 2(2), 234–286.
- Sari, A. P. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah: Studi kasus di Pemerintah Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Keuangan*, 7(2), 73–85.
- Shara, O. H. (2020). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada RSUD Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17.

Ummah, M. S. (2019). *Akuntansi sektor publik* (Vol. 11).

Wulandari, R., & Hartono, T. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 8(3), 112–123.